

KEBERHASILAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN: KASUS DI KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

(The Success of Community Forest Development: Case at Tanggamus District, Lampung Province)

Sylviani, Donny Wicaksono, & Niken Sakuntaladewi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia
email: sylvireg@yahoo.co.id, donnywicaks@yahoo.com, niken_sakuntaladewi@yahoo.co.uk

Diterima 18 Juli 2018, direvisi 2 juli 2019, disetujui 2 Januari 2020

ABSTRACT

Community Forest (CF) development is the Ministry of Environment and Forestry's policy to reduce deforestation, strengthen communities' management rights, and reduce conflicts. This research aims to identify the determinant of CF success factors, including perceptions, community attitudes, potential benefits from CF, institutions, and ability of the community to overcome the problems in managing CF. This study was conducted in Bakti Makmur and Sumber Rejeki CFs, located in Kota Agung Utara Protection Forest Management Unit, Tanggamus District, Lampung Province. Perception analysis using Likert Scale method is to measure perceptions, attitudes, or opinions of a person or group regarding social phenomena. The community income was analyzed using quantitative methods with simple tabulations. The study shows that the community's perception of the CF development is high, both from their understanding, and readiness in implementing the CF program. The gross income of the CF farmer group is estimated at Rp24,760,000/ha/year. This study indicates that CF land can be used as a source of community income. Continuous guidance from the government to CF farmers is necessary in facing challenges that continue to grow, while maintaining forest sustainability, improving forest cover.

Keywords: Perception; community forest; social economic.

ABSTRAK

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menekan laju deforestasi, memperkuat hak kelola rakyat, dan mengurangi konflik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan HKm, di antaranya persepsi, sikap masyarakat, potensi ekonomi yang didapat masyarakat, kelembagaan, dan kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan HKm. Penelitian dilakukan di HKm Bakti Makmur dan Sumber Rejeki yang termasuk dalam wilayah KPHL Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Analisis persepsi menggunakan metode Skala Likert untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Analisis pendapatan petani menggunakan metode kuantitatif dengan tabulasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pengembangan HKm tinggi, baik dari pemahaman maupun kesiapan petani dalam melaksanakan program HKm. Penghasilan kotor masyarakat kelompok tani HKm diperkirakan sebesar Rp24.760.000/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan HKm dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan dari Pemerintah kepada masyarakat petani HKm merupakan kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, tetap menjaga kelestarian hutan, dan memperbaiki tutupan hutan.

Kata kunci: Persepsi; hutan kemasyarakatan; sosial ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia masih diposisikan sebagai sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan sekitarnya. Hutan mempunyai multifungsi, baik fungsi ekonomi, ekologi, maupun sosial, juga bersifat multi komoditas berupa barang dan jasa (Lewerissa, 2015). Oleh karena itu keberadaan hutan perlu untuk dijaga dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati, Haryono, & Hadi, 2013).

Hutan Indonesia hingga saat ini mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang disebabkan oleh berbagai hal, antara lain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang jumlahnya terus meningkat (Nath & Mwchahary, 2012; Gul, Khan, & Khair, 2014; Debel, Tilahun, & Chimdesa, 2014). Pemerintah menyadari pentingnya perubahan paradigma pengelolaan hutan, dari *state-based* menjadi *community-based* dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan perbaikan/penyelamatan hutan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu pilihan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat.

Pemberian izin HKm kepada masyarakat diharapkan akan memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan. Pemberian izin juga mempunyai implikasi yang luas, terutama terhadap kesiapan dan penguatan masyarakat untuk memperoleh hak dan akses dalam pengelolaan sumberdaya hutan, baik secara individu maupun kelompok (Sanudin, Awang, Sadono, & Purwanto, 2016). Kebijakan program pemberdayaan masyarakat sebaiknya transparan, partisipatif, konsisten, dan tepat sasaran. Program ini dirancang dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis kemitraan, sumberdaya hutan berbasis masyarakat; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia

melalui pelatihan oleh aparat pemerintah; serta peningkatan akses dan penguatan sosial ekonomi masyarakat (Reski, Yusran, & Makkarennu, 2017).

KLHK hingga November 2014 telah menerbitkan Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm seluas 328.452 ha yang tersebar di 78 kabupaten dan 23 provinsi, dengan jumlah keluarga tani yang mendapatkan hak kelola sebanyak 100.212 kepala keluarga (KK) atau 510.060 jiwa. Melalui Surat Keputusan Bupati telah diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hkm (IUPHKm) hanya pada areal Hkm seluas 89.880 ha pada 28 kabupaten, dengan rata-rata 1 KK mengelola 3,3 ha (Wiratno, 2014). Keberhasilan kegiatan HKm untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelamatan hutan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain persepsi masyarakat terhadap hutan, kesadaran masyarakat yang diikuti dengan pemahamannya terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan (Lewerissa, 2015).

Kelembagaan melalui organisasi masyarakat petani yang kuat dan mandiri juga penting untuk program HKm (Wijayanto, 2002). Dukungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk pengembangan HKm sangat diperlukan sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat (Rosalia & Ratnasari, 2016). Khususiyah (2009) menyatakan persepsi (pengetahuan) suami dan istri tentang program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program PHBM di Daerah Aliran Sungai (DAS) Konto, Provinsi Jawa Timur yang diinisiasi Perum Perhutani. Dijelaskan bahwa apabila suami tahu atau suami-istri tahu tentang program PHBM maka semakin meningkat dukungan mereka terhadap keberhasilan program PHBM. Dengan tingkat pengetahuan suami yang tinggi terhadap program Perhutani maka akan semakin besar perhatian dan dukungan

terhadap program tersebut. Apabila istri juga paham program PHBM, maka istri dapat memberikan masukan kepada suami dan mereka bersama-sama memperhatikan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan HKm, di antaranya persepsi dan sikap masyarakat terhadap program HKm, pendapatan ekonomi masyarakat yang didapat dari areal HKm, kelembagaan HKm, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan HKm di Kabupaten Tanggamus.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di HKm Bakti Makmur dan HKm Sumber Rejeki yang termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kedua HKm memiliki areal kerja pada kawasan hutan lindung di Gunung Tanggamus yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Tanggamus. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang sudah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm terluas di Indonesia

yaitu 110.139,61 ha (33%). Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten yang mendapatkan PAK HKm terluas di Provinsi Lampung yaitu 45.643,52 ha (41%) dan yang telah mendapat IUPHKm sebanyak 13 unit dengan luas 13.418,52 ha (Wiratno, 2014). Kabupaten Tanggamus, khususnya KPHL Kota Agung Utara, bahkan sudah menetapkan beberapa kelompok tani (poktan) HKm.

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, diskusi kelompok (*focus group discussion/FGD*), wawancara terhadap masyarakat (responden) berdasarkan pedoman yang telah disiapkan (kuesioner), dan wawancara mendalam. Data primer terdiri atas persepsi dan sikap masyarakat terhadap HKm, kesiapan masyarakat dalam pembangunan HKm, manfaat ekonomi yang didapat masyarakat dari areal HKm, dan kesiapan kelembagaan di masyarakat (kelompok tani, koperasi) terhadap pembangunan HKm. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen pendukung, di antaranya monografi desa, dokumen poktan, dan dokumen perizinan HKm. Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Metode pengumpulan data

Table 1 Data collection method

No.	Metode (Method)	Sumber data/responden (Data sources)	Jenis data (Types of data)
1.	Pencatatan (Recording)	Instansi pemerintah (UPT Pusat/BPDASPS, KHPL Kota Agung Utara)	Dokumen tentang perkembangan program HKm di Kabupaten Tanggamus
2.	Wawancara (Interview)	Instansi pemerintah, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, ketua poktan, penyuluh)	Sistem dan proses pembentukan poktan, luas lahan garapan, hak dan kewajiban yang dilakukan terhadap lahan
3.	Pengamatan lapangan (Field observation)	Perwakilan masyarakat (penggarap lahan dan tokoh masyarakat)	Kondisi areal HKm (jenis tanaman dan pemanfaatannya)
4.	Diskusi kelompok (FGD)	Parapihak terkait (tokoh desa, perwakilan anggota poktan), masing-masing HKm 30 orang	Data dan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap HKm, luas lahan garapan, jenis tanaman (pohon hutan dan tanaman pokok, produk yang bisa dihasilkan).

C. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif melalui langkah-langkah pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil pengumpulan data selanjutnya dibahas dalam bentuk tabulasi dan dianalisa dengan menggunakan Skala Likert. Jumlah *informan* (responden) yang diperoleh berasal dari gabungan kelompok tani (gapoktan) Sumber Rejeki sebanyak 30 ($\pm 10\%$) anggota poktan dari 324 anggota poktan. Untuk memperoleh keragaman data, kriteria *informan* adalah: 1) perwakilan masing-masing poktan dari 9 poktan yang ada dan 2) mempunyai lahan garapan di lokasi HKm.

1. Analisis Persepsi

Analisis persepsi dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Skala ini digunakan untuk mengukur, baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan (Choizes, 2017). Penyekalaan dilakukan melalui jawaban atas tiga kategori pertanyaan yang disiapkan untuk responden yaitu:

- a. Memahami atau setuju
- b. Kurang memahami atau kurang setuju
- c. Tidak memahami atau tidak setuju.

Beberapa pertanyaan yang disiapkan untuk mengetahui persepsi, sikap, dan kesiapan responden terhadap pengembangan HKm adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Anda memahami tentang HKm?
- b. Apakah Anda setuju dengan pengembangan program HKm?
- c. Apakah Anda memahami kerusakan hutan akan berdampak pada lingkungan?
- d. Apakah Anda setuju bahwa HKm bermanfaat bagi kehidupan anda?
- e. Apakah Anda setuju ada sanksi bila tidak

mengikuti aturan HKm?

- f. Apakah Anda setuju program HKm dapat meningkatkan pendapatan/penghasilan?
- g. Apakah Anda sudah siap dengan pembentukan poktan?
- h. Apakah Anda siap apabila jenis tanaman disesuaikan dengan kecocokan lahan dan program HKm?

Jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut selanjutnya diberi skor yaitu 1 (tidak), 3(kurang), 5 (memahami) untuk mengetahui persepsi, sikap, dan kesiapanpoktan terhadap pengembangan program HKm (Choizes, 2017). Selanjutnya hasil perkalian antara skor dengan jumlah responden yang menjawab pada masing-masing katagori, dijumlahkan. Total skor menunjukkan tingkat pemahaman, sikap, dan persepsi para poktan terhadap HKm, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, seperti ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2 Skor tingkat pemahaman, persepsi, dan sikap
Table 2 Score of understanding level, perception, and attitude

Kategori pemahaman/persepsi dan sikap (<i>Understanding/perception and attitude category</i>)	Selang skor (<i>Score interval</i>)
Rendah (<i>Low</i>)	30-70
Sedang (<i>Middle</i>)	71-111
Tinggi (<i>High</i>)	112-152

2. Pemanfaatan Hasil Hutan

Pemanfaatan hasil hutan yang tinggi oleh masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kawasan hutan. Hutan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di sekitarnya apabila dikelola secara lestari sehingga terwujud kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan (Lewerissa, 2015). Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah berperan secara aktif dalam pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan

(penyediaan bibit, penyulaman) sampai pada tahap pemeliharaan dan pelestarian sumberdaya hutan, serta ada sanksi bagi masyarakat yang merusak tanaman (Amal & Ichsan, 2016).

3. Analisis Pendapatan Petani

Analisis pendapatan petani dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan tabulasi sederhana. Menghitung jumlah penghasilan petani per hektar dan per tahun dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah produksi yang dihasilkan masing-masing jenis tanaman dengan harga per unit.

$$TR = \sum_{j=1}^n P_j * H_j$$

di mana:

TR = Jumlah penghasilan petani

P_j = Produksi masing-masing jenis tanaman

H_j = Harga masing-masing jenis tanaman per unit

n = Jumlah jenis tanaman

j = Jenis tanaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengembangan HKm

HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal (Prasetyo, 2014). Penyelenggaraan HKm dilakukan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi masalah ekonomi dan sosial masyarakat (Dwiprabowo, Mulyaningrum, & Suwarno, 2013). Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi. Kegiatan pemanfaatan HKm pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, sedangkan di hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (Santoso, 2011).

Kebijakan HKm sejak dikeluarkan pada tahun 1995 mengalami beberapa kali perubahan hingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 dan disempurnakan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menhut-II/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perizinan dan IUPHKm (Pramana, 2015).

Menteri Kehutanan menetapkan Gapoktan HKm Sumber Rejeki pada tahun 2007 dan Gapoktan HKm Bakti Makmur pada tahun 2009. Kedua gapoktan ini mendapat areal garapan di kawasan hutan lindung yang termasuk dalam wilayah KPHL Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus. Dasar hukum penetapan masing-masing HKm ditunjukkan pada Tabel 3.

Izin HKm di Kabupaten Tanggamus, termasuk yang diterima oleh kedua gapoktan tersebut, keberadaannya akan menjadi jelas bila memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan No. 83 tahun 2016. Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemberian IUPHKm harus berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yaitu areal hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

Berdasarkan sejarah pengembangan HKm di Kabupaten Tanggamus, Peraturan Menteri Kehutanan tersebut belum terbit. Dengan demikian penentuan areal IUPHKm belum mengacu pada ketentuan pasal 5 dan peta yang digunakan oleh desa sebagai dasar pertimbangan penentuan lokasi areal HKm belum tentu sinkron dengan peta yang disediakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hasil tinjauan lapangan

Tabel 3 Dasar hukum penetapan HKm Sumber Rejeki dan Bakti Makmur
 Table 3 Legal basis of Sumber Rejeki and Bakti Makmur CF determination

No.	Nama HKm (Name of CF)	SK Menhut (Decree of ministry)	SK Bupati (Decree of regent)	Luas, ha (Area, ha)	Lokasi (Location)
1.	Gapoktan Sumber Rejeki	Nomor 433/Menhut-II/2007	Nomor B.334/23/03/2007	499,6	Gunung Tanggamus Register 30, Dusun Ulu Payung, Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus
2.	Gapoktan Bakti Makmur	Nomor 751/Menhut-II/2009	Nomor B.259/39/12/2009	856,6	Gunung Tanggamus Register 30, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus

Sumber (Sources): Pemerintah Kecamatan (Sub-District Government), 2017

Keterangan (Remark): HKm = Hutan kemasyarakatan (CF = Community Forest).

di KPHL Kota Agung Utara menunjukkan bahwa ijin HKm yang sudah diberikan kepada poktan sebelum terbitnya aturan PIAPS tidak dicabut. Kedua poktan HKm tetap bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski masih menyisakan persoalan kesesuaian peta IUPHKm dengan PIAPS, masyarakat di kedua gapoktan berpegang pada IUPHKm yang telah mereka terima untuk tetap menjalankan aktivitas kesehariannya di areal HKm. Adanya izin yang sah dari Pemerintah berupa izin HKm menjadikan semua responden dapat bekerja dengan tenang. Mereka tidak enggan dan tidak takut untuk berinvestasi menanam berbagai macam tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan berkayu, dan berbagai jenis tanaman lainnya (Tabel 4). Tanaman tersebut tumbuh dengan subur menghampar di ladang HKm dan masyarakat sudah merasakan hasil dari investasi mereka. Mereka merasa aman berusaha karena tidak ada lagi petugas yang mengusir atau melakukan pemungutan ilegal kepada mereka saat bekerja di areal HKm.

B. Perkembangan HKm di Kabupaten Tanggamus

Perkembangan HKm di Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2013 menunjukkan bahwa realisasi IUPHKm dan PAK mencapai 64.430,74 ha atau 75,80% dari total target HKm seluas 85.000 ha pada

tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa HKm di Provinsi Lampung berkembang cukup baik (Sanudin *et al.*, 2016). Cepatnya perkembangan HKm dikarenakan antara lain dukungan dari Pemerintah Daerah. Dalam bagian ini dibahas beberapa hal yang berpotensi menjadikan HKm di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung bisa berkembang dengan baik, khususnya di HKm Sumber Rejeki dan HKm Bakti Makmur.

1. Pemanfaatan Lahan Garapan

Masyarakat di Kabupaten Tanggamus kebanyakan adalah pendatang. Mereka mengikuti program transmigrasi untuk mencari kehidupan di tempat baru dan menanam lahan di sekelilingnya dengan berbagai tanaman kehidupan. Jenis tanaman yang dikembangkan di lahan HKm di Kabupaten Tanggamus berbeda-beda sesuai dengan kondisi biofisik dan sistem penanaman. Jenis penanaman yang dikembangkan mempunyai dua fungsi yakni fungsi lindung terhadap tanah dan fungsi ekonomi agar memberikan pendapatan bagi petani secara berkelanjutan.

Masyarakat yang tergabung dalam Poktan Bakti Makmur dan Sumber Rejeki kebanyakan adalah pendatang dari pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi. Kepindahan mereka sudah dimulai sejak jaman pemerintahan Soekarno. Dengan

Tabel 4 Jenis tanaman pada Gapoktan HKm Sumber Rejeki dan Bakti Makmur

Table 4 Species of plantations in Sumber Rejeki and Bakti Makmur CF farmer group

No.	Gapoktan HKm (CF group farmer)	Tanaman berkayu (Woody plant)	Tanaman budidaya tahunan berkayu (Annual woody cultivation number species)	Tanaman lainnya (Other species)
1.	Sumber Rejeki	Afrika, albasia, cempaka, dadap, durian, jambon, mahoni, medang, mindi, randu, suren	Alpukat, angrong, asam, benda, cengkeh, coklat, dukuh, jambu, jengkol, kopi, limus, mangga, manggis, melinjo, nangka, pala, petai	Jambu, jeruk bali, menteng, pisang, pinang, lada, sayur-sayuran
2.	Bakti Makmur	Cempaka, dadap, durian, randu, kemiri, ketapang, mahoni, mindi, puspa	Alpukat, ampelas, aren, bayur, cengkeh, coklat, dukuh, jengkol, kecapi, kelapa, limus, manggis, menteng, melinjo, nangka, pala, petai, pinang	Jambu, rambutan rerak, iwil-iwil, lada, sayur-sayuran

Sumber (Sources): Data primer, diolah (Primary data, processed).

demikian mereka telah menanam lahan di sekitar tempat tinggal mereka dengan berbagai jenis tanaman jauh sebelum ditetapkan program HKm. Kini areal HKm Sumber Rejeki dan HKm Bakti Makmur banyak ditanami *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) sebagai tanaman bertajuk tinggi dan tanaman bertajuk pendek.

Sesuai dengan kondisi topografi lahan dimana sebagian besar merupakan pegunungan dataran tinggi, dan kondisi tanah di daerah tersebut, tanaman utama tajuk pendek yang dikembangkan di HKm Sumber Rejeki adalah kopi dan di HKm Bakti Makmur adalah coklat. Tanaman lain yang dikembangkan adalah tanaman semusim, tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, tanaman kayu, dan tanaman di bawah tegakan (empon-empon, dan lain-lain). Selain pertimbangan biofisik lapang, pilihan petani terhadap jenis pohon yang ditanam juga mempertimbangkan harga serta pasar yang sudah ada.

Bentuk usaha masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan seperti tanaman semusim, buah-buahan, dan jenis MPTS lainnya merupakan dampak dari pemeliharaan ekosistem kelestarian hutan oleh masyarakat (Yanto, 2013). Peraturan Menteri LHK No. P 12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri menyebutkan bahwa jenis tanaman

kehutanan terdiri dari tiga kategori yaitu jenis tanaman hutan berkayu, jenis tanaman budidaya tahunan berkayu, dan jenis tanaman lainnya. Dari hasil FGD didapat informasi jenis tanaman/pohon yang ditanam di areal masing-masing HKm sebagaimana Tabel 4.

Masyarakat yang tergabung di kedua Hkm tersebut menanam tanaman hutan berkayu lebih dari 50%, selebihnya mereka menanam tanaman budidaya tahunan berkayu, dan sekitar 2-3% menanam jenis tanaman lainnya. Pemanfaatan lahan garapan dengan komposisi jenis tanaman kayu lebih besar dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya adalah sesuai dengan biofisik, juga status fungsi kawasan yang merupakan hutan lindung. Pengembangan jenis tanaman kayu dapat meningkatkan konservasi lahan dan fungsi lindung kawasan.

Sebagai penunjang utama ekonomi masyarakat, kopi dan coklat terus dikembangkan di kedua HKm tersebut. Tanaman kopi memerlukan naungan dan oleh masyarakat dikombinasikan dengan tanaman tajuk sedang dan tajuk tinggi. Tanaman naungan yang dipilih adalah jenis MPTS seperti alpukat (*Persea americana*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), durian (*Durio zibethinus*), petai (*Parkia speciosa*), jengkol (*Archidendron pauciflorum*), dan kemiri (*Aleurites moluccana*). Sistem agroforestri yang terbentuk dari kombinasi

tanaman kopi dengan tanaman MPTS mampu berperan sebagai penyedia jasa ekosistem seperti konservasi biodiversitas dan terpeliharanya beberapa sumber mata air sebagai sumber konsumsi air bagi masyarakat sekitar.

2. Kelembagaan

Hutan lindung yang ada di Kabupaten Tanggamus berada dalam pembinaan KPHL Kota Agung Utara. Masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam kelompok HKm banyak yang sudah mendapat izin usaha pemanfaatan lahan hutan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 751/Menhut-II/2009 ditetapkan kawasan hutan sebagai areal kerja HKm seluas 12.061,30 ha di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Gapoktan Bakti Makmur ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 751/Menhut-II/2009 dengan areal kerja seluas 856,1 ha di Pekon/Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. SK Menhut tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten dengan diterbitkannya SK Bupati

No. B.259/39/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Pemberian IUPHKm kepada Gapoktan Bakti Makmur yang terdiri atas 11 poktan. Izin usaha tersebut terletak di register 30 Hutan Lindung Gunung Tanggamus.

Gapoktan Sumber Rejeki ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 437/Menhut-II/2007 dengan areal kerja HKm seluas 499,563 ha di Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. SK ini ditindaklanjuti dengan SK Bupati No. B.334/23/03/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian IUPHKm kepada Gapoktan HKm Sumber Rejeki yang terdiri dari 9 poktan. Izin usaha tersebut berada pada register 30 Hutan Lindung Gunung Tanggamus, dengan jangka waktu selama 35 tahun dan diperpanjang setiap 5 tahun. Profil kedua HKm tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 memperlihatkan adanya variasi luasan lahan yang dimiliki anggota Gapoktan HKm Bakti Makmur dan Sumber Rejeki, yakni kurang dari 1 ha hingga sekitar 2 ha. Anggota poktan IV Gapoktan Bakti Makmur mempunyai rata-rata luasan

Tabel 5 Profil HKm Bakti Makmur dan Sumber Rejeki
Table 5 Profile of Bakti Makmur and Sumber Rejeki CF

Bakti Makmur				Sumber Rejeki			
Poktan (Group of farmers)	Jumlah anggota (Number of members)	Luas (Area) (ha)	Rata-rata (Average) (ha)	Poktan (Group of farmers)	Jumlah anggota (Number of members)	Luas (Area) (ha)	Rata-rata (Average) (ha)
I	55	72	1,31	I	51	62,09	1,21
II	64	69	1,07	II	32	62,93	1,96
III	58	61,5	1,06	III	51	101,72	1,99
IV	33	24,5	0,74	IV	49	74,73	1,52
V	26	27,5	1,06	V	38	58,93	1,55
VI	67	58,75	0,88	VI	40	63,23	1,58
VII	51	55,0	1,08	VII	23	37,46	1,63
VIII	45	50,5	1,12	VIII	63	79,63	1,26
IX	41	38	0,93	IX	28	42,55	1,52
X	30	25,25	0,84				
XI	42	43,5	1,03				
Jumlah (Total)	512	525,5		Jumlah (Total)	364	583,69	
Rata-rata (Average)		1,02 ha		Rata-rata (Average)		1,60 ha	

Sumber (Source): Rencana Umum Pengelolaan HKm Bakti Makmur dan Sumber Rejeki (*The general management plan of Bakti Makmur dan Sumber Rejeki CF*), 2010.

lahan HKm terkecil (0,74 ha), sementara anggota poktan II dan III Gapoktan Sumber Rejeki memiliki rata-rata luas lahan HKm sekitar 2 ha. Karena statusnya sebagai hutan lindung, masyarakat pemegang izin HKm tersebut mendapat hak untuk memanfaatkan (tidak memiliki) kawasan hanya untuk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Selain pemberian hak, mereka berkewajiban untuk melakukan penataan batas areal, menyusun rencana kerja, melakukan penanaman, pengamanan dan pemeliharaan, serta membayar provisi sumberdaya hutan dari memanfaatkan kawasan yang terletak di hutan lindung untuk mengusahakan hutan tanaman.

Kelembagaan di Gapoktan Sumber Rejeki dan Bakti Makmur sudah cukup mapan. Mereka mempunyai ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua kelompok tani yang telah berfungsi. Mereka paham benar akan tugas dan kewajiban dalam menjalankan roda organisasi. Baik pengurus gapoktan maupun anggotanya telah memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai penggarap area HKm. Pengamanan wilayah betul-betul mereka lakukan sehingga tidak terjadi perambahan hutan di wilayah HKm.

3. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi petani HKm di kedua lokasi penelitian cukup memadai. Responden menyatakan bahwa setelah mengikuti HKm, rumah mereka jauh lebih bagus terbuat dari batu bata, kebanyakan mempunyai kendaraan bermotor roda dua, menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi, dan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Rukka (2003) dalam Afriani & Zulkarnaen (2014) menyatakan bahwa pendidikan umumnya akan mempengaruhi cara dan pola pikir petani. Pendidikan yang relatif tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis. Dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani dengan

motivasi mereka dalam menerapkan hutan kemasyarakatan. Tingkat pendidikan formal berpengaruh dalam pengambilan keputusan usaha tani, terutama yang terkait dengan adopsi teknologi yang baik bagi peningkatan produksi usaha taninya. Teknologi tersebut dapat membuat petani lebih efisien dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Tingkat pendidikan formal petani responden masih rendah, sebagian besar (sekitar 41%) bersekolah sampai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP)/ sederajat sekitar 38%, dan tingkat sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat sekitar 23%. Meskipun lebih dari 50% tingkat pendidikan formal petani responden rendah, namun karena mereka mempunyai pengalaman bertani cukup lama secara turun-temurun, hal ini tidak berpengaruh terhadap teknik pengelolaan lahan. Masyarakat paham tentang teknik menanam, memelihara, dan memanen berbagai macam tanaman di lahan HKm. Responden juga mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang HKm. Pendidikan informal dan pemahaman tentang HKm berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan HKm.

Potensi yang terdapat dalam kawasan hutan lindung, baik dalam pemanfaatan jasa lingkungan maupun pemungutan hasil hutan bukan kayu perlu dilindungi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pemberdayaan petani HKm sebagai upaya meningkatkan kemampuan mereka agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal sehingga menjadikan mereka mandiri (Heryatna & Husni, 2015).

Mata pencaharian anggota gapoktan HKm seluruhnya merupakan petani hutan dan masih sangat tergantung pada kawasan hutan. Penghasilan mereka bervariasi, tergantung pada jenis dan jumlah produksi tanaman yang mereka tanam (tanaman musiman, buah-buahan), serta harga di pengepul yang cenderung berfluktuasi karena berbagai hal. Saat panen raya,

harga komoditas cenderung turun. Namun demikian, penghasilan petani setelah mengikuti program HKm cenderung lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Harga produk beberapa jenis tanaman setelah ada program HKm disajikan pada Tabel 6.

Untuk mengetahui perkiraan penghasilan petani HKm, Tabel 7 memberikan gambaran jenis tanaman dan potensi penghasilan dari salah seorang responden yang merupakan tokoh masyarakat petani HKm dengan areal

garapan HKm seluas 1,75 ha.

Pendapatan tersebut didapat dari pemanfaatan lahan garapan HKm dan hanya berasal dari tanaman yang telah menghasilkan buah. Tanaman yang belum menghasilkan buah belum diperhitungkan. Besaran penghasilan tersebut merupakan penghasilan kotor sebelum biaya pemasaran. Transportasi hasil panen cukup tinggi, dapat mencapai 10% dari nilai jual produk. Hal ini karena menggunakan jasa ojek yang hanya bisa mengangkut produk dalam

Tabel 6 Kisaran harga beberapa jenis tanaman dominan di areal HKm
 Table 6 Price range for some dominant plantation species in CF areal

No.	Jenis tanaman (Types of plantation)	Harga terendah (Lowest price) (Rp)	Harga tertinggi (Highest price) (Rp)	Satuan (Unit)	Produksi/ha (Production/ha)	Keterangan (Remark)
1.	Kopi (Coffee)	20.000	27.000	kg	1-1,5 ton	Kering
2.	Coklat (Chocolate)	15.000	21.000	kg	0,5-1 ton	Kering
3.	Cengkeh (Clove)	75.000	100.000	kg	5 kg/batang	
4.	Lada (Pepper)	30.000	40.000	kg	20 kg/batang	
5.	Durian (Durian)	10.000	15.000	gandeng	20 gandeng -	1 gandeng minimal 2 buah
6.	Petai (Petai)	50.000	100.000	empong	200 lempeng/ batang	1 empong = 100 lempeng
7.	Pala (Nutmeg)	30.000	40.000	kg		
8.	Dukuh (Hamlet)	2.000	5.000	kg		
9.	Manggis (Mangosteen)	5.000	10.000	kg		
10.	Jengkol (Jengkol)	5.000	6.000	kg		
11.	Kemiri (Pecan)	3.000	5.000	kg		

Sumber (Sources): Data primer, diolah (Primary data, processed), 2016.

Tabel 7 Perkiraan penghasilan petani anggota poktan per tahun
 Table 7 Income estimation of farmer as a member of farmer group per year

No.	Jenis tanaman (Types of plant)	Jumlah, batang (Total, stems)	Produksi/tahun (Production/year)	Harga rata-rata (Average price) (Rp/ unit)	Penghasilan (Income) (Rp)
1.	Coklat (Chocolate)	1.200	6 kwintal	18.000	10.800.000
2.	Durian (Durian)	40	60 butir/batang	12.500	15.000.600
3.	Pala (Nutmeg)	200	10 kg	35.000	350.000
4.	Jengkol (Jengkol)	20	60 kg/pohon	5.500	6.600.000
5.	Kelapa (Coconut)	8	12 tandan/pohon	20.000	1.920.000
6.	Dukuh (Hamlet)	8	40 kg/pohon	3.500	1.120.000
7.	Cengkeh (Clove)	20	3 kg/pohon	90.000	5.400.000
8.	Petai (Petai)	20	200 papan/pohon	75.000	1.500.000
9.	Kemiri (Pecan)	4	40 kg/pohon	4.000	640.000
Jumlah penghasilan/tahun (Total income/year)					43.330.000
Jumlah penghasilan/ha/tahun (Total income/ha/year)					24.760.000

Sumber (Sources): Data primer, diolah (Primary data, processed), 2016.

jumlah terbatas. Untuk mengurangi biaya transportasi tersebut sebagian besar petani mengangkut sendiri hasil panennya sampai ke tempat pembeli. Berdasarkan hasil perhitungan nilai jual dan jumlah produksi yang dihasilkan per tahun, pendapatan petani tersebut berkisar Rp3.600.000/bulan.

C. Persepsi dan Sikap Masyarakat Petani HKm

Kelestarian hutan dan kehidupan ekonomi masyarakat desa hutan merupakan dua hal yang seringkali menjadi isu mengemuka. Isu kerusakan hutan sering dikaitkan dengan sejumlah penduduk sekitar hutan yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mereka melakukan penebangan hutan secara liar (Mustofa, 2011). Faktor penting lain yang berpengaruh terhadap kerusakan hutan adalah terbukanya aksesibilitas ke hutan, sebagaimana terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (Purba *et al.*, 2014). Persepsi yang benar terhadap suatu objek sangat diperlukan, sebab persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku (Masria, Golar, & Ihsan M, 2015) sehingga program penyelamatan hutan dapat terwujud (Khususiyah, 2009).

Persepsi masyarakat terhadap pengembangan HKm di Gapoktan Sumber Rejeki dapat diketahui melalui pengetahuan

dan pemahaman mereka tentang program HKm, fungsi dan manfaat hutan, dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan, serta dampaknya bagi kehidupan mereka. Dalam rencana pembangunan HKm, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan HKm adalah kesiapan masyarakat. Dalam mengelola HKm dibutuhkan orang-orang yang siap bekerja dan bertanggung jawab pada porsinya masing-masing (Possumah, Golar, & Toknok, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat Pekon/Desa Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus terhadap pengembangan HKm secara keseluruhan seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 memperlihatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan HKm adalah tinggi dengan nilai 136 dan 138. Tingginya pemahaman masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Pengetahuan petani tentang HKm. Meski tingkat pendidikan petani sebagian besar hanya SD namun mereka sangat memahami manfaat, fungsi serta dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan, misalnya dengan tidak melakukan penebangan sekitar sumber mata air.

Tabel 8 Pemahaman dan kesiapan petani terhadap pengembangan HKm Sumber Rejeki

Table 8 Farmer's understanding and readiness to develop Sumber Rejeki CF

No.	Pemahaman (<i>Understanding</i>)				Kesiapan (<i>Readiness</i>)			
	Kategori (<i>Category</i>)	Skor (<i>Score</i>)	Jumlah responden (<i>Total respondents</i>)	Nilai skor (<i>Score value</i>)	Kategori (<i>Category</i>)	Skor (<i>Score</i>)	Jumlah responden (<i>Total respondents</i>)	Nilai skor (<i>Score value</i>)
1.	Tidak paham (<i>Don't understand</i>)	1	2	2	Tidak siap (<i>Not ready</i>)	1	-	-
2.	Kurang paham (<i>Don't understand</i>)	3	3	9	Belum siap (<i>Not ready</i>)	3	6	18
3.	Memahami (<i>Understand</i>)	5	25	125	Siap (<i>Ready</i>)	5	24	120
Jumlah (<i>Total</i>)			30	136	Jumlah (<i>Total</i>)		30	138

Sumber (*Sources*): Data setelah diolah (*Data processing*)

Keterangan (*Remarks*): Rendah (*Low*): 30-70, Sedang (*Middle*): 71-111, Tinggi (*High*): 112-152.

2. Sosialisasi yang intensif dari pengelola kawasan (KPHL) terhadap program pemerintah. Pengelola KPHL sering berkunjung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat hutan serta hak dan kewajiban mereka terhadap hutan. Kunjungan dilakukan hingga ke tapak lahan-lahan garapan petani.

D. Potensi Pengembangan Gapoktan HKm Sumber Rejeki dan Gapoktan HKm Bakti Makmur

Program HKm dinilai bagus oleh anggota Gapoktan HKm Sumber Rejeki dan Bakti Makmur karena mampu memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Manfaat dimaksud antara lain:

1. Adanya kejelasan status dan pemilikan lahan garapan yang memberikan ketenangan dalam mengelola lahan dan tidak terjadi konflik antara petani dengan aparat pemerintah dan antar petani penggarap.
2. Air bersih tersedia bagi masyarakat di musim hujan maupun kemarau.
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan lahan dan hutan terjaga dengan baik.
4. Pendidikan anak-anak lebih terjamin.
5. Koordinasi yang baik antar poktan.
6. Pengangguran berkurang dan penghasilan petani anggota gapoktan meningkat.

Meski telah memberikan berbagai manfaat, masih dirasakan beberapa tantangan yang perlu dicarikan jalan penyelesaiannya agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih baik dari aspek ekonomi dan sosial dari program tersebut. Permasalahan yang dihadapi anggota kedua gapoktan tersebut antara lain: (1) akses jalan menuju lokasi lahan garapan, (2) kurangnya tenaga penyuluh, (3) kelembagaan koperasi yang belum aktif karena kurangnya tenaga dan pengetahuan warga, (4) keberadaan penggarap yang belum atau tidak ingin menjadi anggota poktan namun lahan

mereka berdekatan dengan lahan HKm.

Lahan garapan masyarakat di area HKm paling dekat berjarak \pm 5 km dari desa dan terletak pada ketinggian sekitar 350-850 mdpl. Jalan menuju lokasi tersebut masih berupa tanah dan sempit sehingga hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Pada musim kemarau diperlukan waktu sekitar 6 jam untuk menuju lahan mereka. Pada musim penghujan mereka harus menyiapkan rantai besi untuk dipasang di roda sepeda motor agar bisa naik menuju lahan garapan. Kondisi infrastruktur seperti ini menjadikan masyarakat tidak leluasa mengangkut hasil usaha mereka dan menyebabkan tingginya biaya transportasi. Akibatnya keuntungan yang mereka peroleh menjadi berkurang.

Penyuluh menempati posisi penting sebagai agen perubahan karena mereka berhubungan langsung dengan petani di lapangan. Penyuluh berperan besar sebagai pendidik, diseminasi informasi/ inovasi, dan *supervisor* (Yulida, Kausar, & Marjelita, 2012). Tenaga penyuluh sangat diperlukan petani HKm Sumber Rejeki dan Bakti Makmur untuk mengoptimalkan manfaat HKm. Dalam perkembangannya, dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mengatur penggabungan tenaga penyuluh yang diarahkan ke sektor pertanian. Arah tersebut dikarenakan sektor ini sangat dominan, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, arahan ini menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan areal HKm. Terdapat sembilan orang penyuluh yang mencakup HKm di Kabupaten Tanggamus, jumlah tersebut dirasakan petani HKm sangat terbatas. Tidak ada jadwal kunjungan tetap, menjadikan pendampingan kelompok kurang efektif. Berlakunya UU 23 tahun 2014 menyebabkan terjadi transisi di mana tenaga penyuluh diperbantukan di KPH. Kebijakan ini memberikan sinyal positif

bagi pembangunan KPH, khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Kelembagaan koperasi di HKm Bhakti Makmur belum terbentuk. Masyarakat menjual hasil coklat di pasar dan tengkulak. Untuk HKm Sumber Rejeki, kelembagaan koperasi sudah terbentuk, sudah mempunyai AD/ART, tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian besar anggota koperasi masih menjual kopi hasil HKm ke penampung dan sebagian besar anggota koperasi belum membayar iuran wajib sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Tidak semua warga masyarakat bergabung dalam kelompok tani HKm meskipun lahan garapan mereka berdampingan dengan lokasi HKm. Hasil wawancara menyebutkan mereka tidak mau mengikuti ketentuan HKm karena mengharuskan menanam tanaman kehutanan sesuai topografi lahan. Mereka menghendaki seluruh lahan garapan ditanami dengan tanaman perkebunan dan buah-buahan yang dapat memberikan penghasilan rutin, baik harian maupun bulanan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program HKm di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus, berkembang cukup baik. Kelompok tani HKm Bhakti Makmur dan Hkm Sumber Rejeki secara umum lebih cenderung mengembangkan tanaman komoditas pertanian pada kawasan hutan lindung. Selain tanaman rempah-rempah dan sayuran, masing-masing HKm mengembangkan tanaman yang berbeda. Komoditas utama HKm Bhakti Makmur adalah coklat, sementara komoditas utama HKm Sumber Rejeki adalah kopi. Berdasarkan analisis pendapatan, perkiraan penghasilan kotor setiap anggota poktan HKm sebesar Rp24.760.000/ha/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan

HKm dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap pengembangan HKm adalah tinggi. Hal ini diukur melalui pengetahuan dan pemahaman petani tentang program HKm, fungsi dan manfaat hutan, dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan, serta dampak bagi kehidupan mereka. Gapoktan HKm sudah mempunyai kesadaran terhadap fungsi dan manfaat hutan serta dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat petani HKm merupakan kebutuhan yang penting guna menjaga kelestarian hutan dan memperbaiki tutupan hutan.

B. Saran

Direkomendasikan agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh KLHK melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk tiap poktan hutan sehingga dapat diketahui perkembangan implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak, dalam hubungannya dengan perbaikan tutupan hutan dan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan kepada masyarakat petani hutan perlu dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala KPHL Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus beserta staf yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi. Terima kasih juga kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim yang telah membantu kegiatan ini, serta dewan redaksi yang telah memberikan saran-sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, I., & Zulkarnaen. (2014). *Kajian Hutan Kemasyarakatan (HKm): analisis kelembagaan pada masyarakat di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kajian pada masyarakat di kawasan register 28, 30, 32 Kabupaten Tanggamus* (Laporan Penelitian). Kerjasama Konsorsium Kota Agung Utara dan STIPER Dharma Wacana.
- Amal, & Ichsan, B. I. (2016). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientific Pinisi*, 2(1), 1–7.
- Choizes. (2017). *Pengertian Skala Likert dan contoh cara hitung kuesionernya*. Diunduh 30 November 2017 dari <http://www.diedit.com/skala-likert/>.
- Debel, F., Tilahun, U., & Chimdesa, D. (2014). The impact of population growth on forestry development in East Wollega Zone: the case of Haro Limu District. *Journal of National Sciences Research*, 4(18), 85-91.
- Dwiprabowo, H., Mulyaningrum, & Suwarno, E. (2013). Organisasi belajar dan implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 85–98.
- Gul, S., Khan, M.A., & Khair, S. (2014). Population increase: a maor cause of deforestation in District Ziarat. *Journal of Applied and Emerging Sciences*, 2(5), 124-132.
- Heryatna, D., Sofyan, Z., & Harnani, H. (2015). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan di Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(1), 58–64.
- Khususiyah, N. (2009). *Analisis dampak Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap pendapatan masyarakat dan lingkungan di DAS Konto Malang* (Thesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kurniawati, A., Haryono, & Hadi, M. (2013). Pengelolaan dana sharing produksi kayu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1912–1916.
- Lewerissa, E. (2015). Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry*, 10(1), 10–20.
- Masria, Golar, & Ihsan, M. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, 3(2), 57–64.
- Mustofa, M. S. (2011). Perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan. *Jurnal Komunitas Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 1–11.
- Nath, D. C., & Mwchahary, D. (2012). Population increased and deforestation: a study in Kokrajhar District of Assam, India. *International Journal of Scientific and Research Publication*, 2(10), 1-12.
- Peraturan Menteri LHK Nomor:P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
- Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Possumah, I. M., Golar, & Toknok, B. (2015). Kesiapan masyarakat terhadap pembangunan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo Poso, Pesisir Utara. *Warta Rimba*, 3(2), 124–131.
- Pramana, S. B. (2015). *Mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Bengkulu: Yayasan Akar.
- Prasetyo, A. B. (2014). Hutan kemasyarakatan. *Warta BP2SDM*.
- Purba, C.P.P., Nanggara, S.G., Ratriyono, M., Apriani, I., Rosalina, L., ..., & Meridian, A. (2014). *Potret keadaan hutan Indonesia periode 2009-2013*. Jakarta: Forest Watch Indonesia.
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu. (2017). Rancangan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(1): 37–43.
- Rosalia, F., & Ratnasari, Y. (2016). Analisis pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tahun 2010. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 18(1), 34–38.
- Santoso, H. (2011). Hutan kemasyarakatan dan hutan desa: tafsir setengah hati Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan R.I. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*, 13(1), 53–78.
- Sanudin, Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, R. H. (2016). Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(2), 276–283.
- Wijayanto, N. (2002). Analisis strategis sistem pengelolaan repong damar di pesisir Krui, Lampung. *Manajemen Hutan Tropika*, VIII(1), 39–49.

- Wiratno. (2014). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Yanto, E. W. B. (2013). Partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan. *Journal of Educational Social Studies Program Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 29-33.
- Yulida, R., Kausar, & Marjelita, L. (2012). Dampak kegiatan penyuluhan terhadap perubahan perilaku petani sayuran di kota Pekanbaru. *Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 3(2), 37-58.